



Prosiding

KONGRES PANCASILA VI



Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa

Ambon, 31 Mei - 01 Juni 2014



Kerjasama

Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada dan
Universitas Pattimura Ambon

2014

Copyrighted material

Prosiding Kongres Pancasila VI: *Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*

Penyusun:

Tim Pusat Studi Pancasila UGM
Tim Universitas Pattimura Ambon

Editor:

Hendro Muhaimin
Hastangka
Diasma Sandi Swandaru
Agung SS Widodo
Endah Agustiani
Surono
Silva Meliana

Cover:

moh rifai

Penerbit

Pusat Studi Pancasila
Universitas Gadjah Mada
Jl. Podocarpus II, D-22 Bulaksumur
Yogyakarta 55281

ISBN: 978-602-7918-04-7

**PROSIDING KONGRES PANCASILA VI diterbitkan atas kerjasama
Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada dan
Universitas Pattimura Ambon tahun 2014**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - 5

LAPORAN KETUA PANITIA - 9

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA ~ 13

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN DEKLARASI ~ 17

KEYNOTE SPEECH – Gubernur Maluku ~ 23

MAKALAH-MAKALAH NARASUMBER

- Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila
-- Sudjito - 33
- Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi Dan Integrasi Pelembagaan Dan
Pembudayaan Pancasila Dalam Bidang Politik, Hukum Dan
Ketatanegaraan
-- Zeth Sahuburua - 47
- Pokok-Pokok Pikiran Mewaspada Ancaman Terhadap Ideologi Pancasila
- Isnawan - 55
- Kebangsaan, Kerakyatan Dan Kebudayaan
-- Sri-Edi Swasono - 69
- Penguatan Sinkronisasi, Harmonisasi Dan Integrasi Pelembagaan Dan
Pembudayaan Pancasila Dalam Bidang Ekonomi, Energi, Dan Teknologi
-- Thomas Pentury - 107
- Membangun Sistem Pendidikan Nasional, Mewujudkan Manusia
Indonesia Yang Unggul Dan Berkarakter
-- Asep Saefuddin - 113
- Pembudayaan Pancasila
- Kaelan - 125
- Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi Dan Integrasi Pelembagaan Dan
Pembudayaan Pancasila Dalam Bidang Media Budaya
-- Karel Albert Ralahu - 153
- Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi Dan Integrasi Pelembagaan Dan
Pembudayaan Pancasila Dalam Bidang Filsafat Dan Kebudayaan
-- Aholiab Watloly - 163

MAKALAH-MAKALAH CALL FOR PAPERS ~ 178

FOTO KONGRES PANCASILA VI - 518

MEMBANGUN NASIONALISME DI WILAYAH PERBATASAN MELALUI PENGUATAN MODAL SOSIAL

Moh. Bahzar

Ciri utama wilayah perbatasan adalah kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur yang masih tertinggal daripada wilayah lain di suatu negara. Karena itu, permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi ini mendorong mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau sekedar bertindak praktis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terganggu atau gelisah terhadap aspek lain yang mungkin membahayakan atau mengancam keutuhan dan kedaulatan negaranya. Karena itu mereka hidup di daerah perbatasan sebenarnya memiliki fungsi strategis dalam mengawasi dan menjaga pintu-pintu masuk yang mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa.

Keterkikisan kebanggaan dan perasaan sebagai suatu bangsa mudah terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Hal ini bukan saja karena sulit dan minimnya mendapatkan akses dan pelayanan dari pemerintah, negaranya, tetapi juga karena mereka telah terbiasa dengan pengalaman sehari-hari yang menjadikannya tidak kritis terhadap suasana yang mengancam negaranya.

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan menurut rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2010-2014 lebih ditekankan pada upaya pengembangan kawasan perbatasan sebagai pintu masuk gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga tentu mengembirakan. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa peningkatan kualitas kehidupan ekonomi daerah perbatasan ini penting untuk dilakukan bersama-sama dengan penguatan nasionalisme pada mereka sehingga mereka pun menjadi penjaga tangguh ideologi dan keutuhan bangsa. Tulisan ini secara ringkas mengupas bagaimanakah penguatan modal sosial itu dilakukan.

Kata Kunci: nasionalisme, modal sosial, wilayah perbatasan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelago) berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik di wilayah darat, laut, maupun udara. Batas wilayah Indonesia di darat berada di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, di Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timur Leste. Sementara itu, wilayah laut Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu Filipina, India, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapore, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timur Leste. Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia ini termasuk pulau-pulau kecil terluar ini merupakan wilayah terpencil dan kondisinya masih tertinggal atau

terbelakang, walaupun sebenarnya juga berfungsi sebagai pagar dan “pagar perlindungan” wilayah-wilayah “dalam” Indonesia.

Permasalahan yang muncul di wilayah-wilayah perbatasan memerlukan penanganan yang sinergis dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, *stakeholders* maupun masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan selain terkait dengan permasalahan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), nasionalisme, keamanan dan ketertiban, juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, penanganan terhadap permasalahan di wilayah perbatasan tidak dapat ditangani secara parsial (sendiri-sendiri) oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan keterlibatan pihak-pihak lain seperti: TNI, Polri, tokoh formal, maupun tokoh informal, serta masyarakat setempat secara simultan.

Secara garis besar, isu-isu yang muncul di wilayah perbatasan negara terdiri atas dua bagian (Faozan, 2006) yaitu: (1) penentuan batas-batas negara secara fisik dan pengamanannya; (2) pembangunan wilayah perbatasan negara terkait dengan batas wilayah. Marsetyo (2008) merinci permasalahan yang berkembang di wilayah perbatasan yaitu belum ditetapkannya perbatasan wilayah dengan letak Negara tetangga, belum ditetapkannya batas wilayah antar daerah provinsi, kabupaten/kota, pengelolaan wilayah perbatasan laut masih sektoral, dan pembinaan masyarakat perbatasan termarjinalkan, sehingga terkesan pemerintah daerah belum sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan.

Pembangunan wilayah perbatasan tidak pernah bisa dilepaskan dari masyarakat setempat. Dalam perspektif ini, pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan menunjuk pada kelompok orang yang tinggal dalam satu satuan teritorial tertentu dan memiliki struktur sosial budaya tertentu pula (Lawang, 2003). Kekhasan dan karakteristik masyarakat setempat menjadi variabel penting yang harus diperhatikan. Keberhasilan pembangunan wilayah ini akan memberikan hasil yang memuaskan jika mereka tidak diposisikan semata-mata sebagai objek pembangunan, tetapi terutama sebagai subjek pembangunan.

Setiap masyarakat memiliki strukturnya sendiri; cara suatu masyarakat diatur dan ditata. Pengaturan itu dilakukan dengan perangkat norma yang disusun oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai dapat menggambarkan aktivitas yang berupa anjuran, larangan, ungkapan, dan peribahasa yang menjadi prinsip dan pedoman untuk bertindak yang patut dipertahankan, karena bermanfaat positif dalam menentukan sikap hidup. Melalui nilai-nilai itu terungkap segala sesuatu tentang yang baik dan yang buruk (Pepper dalam Haryono, 2008) yang patut dipedomani dalam bertingkah laku. Nilai-nilai lokal ini menjadi penguatan integrasi lokal setempat. Dalam konteks kehidupan berbangsa, tentu nilai-nilai ini tidak seharusnya berposisi sebagai penghalang kekuatan nasional untuk mengikat kebersamaan sebagai suatu bangsa, bahkan nilai-nilai ini dapat menjadi kekuatan untuk membangun nilai-nilai kecintaan dan keterikatan sebagai satu bangsa.

Nilai-nilai kebangsaan yang berwujud rasa cinta tanah air dan bangsa dapat ditumbuhkan melalui penguatan paham kebangsaan atau nasionalisme (Rauf, 2008).

Kohesi nasional memiliki dua pilar utama yaitu yakni kebersamaan dan kemajuan. Apabila salah satu pilar atau kedua-duanya mengalami hambatan bahkan kemacetan, maka keretakan kohesi nasional akan terjadi. Sebaliknya, apabila kedua pilar tidak mengalami hambatan dan berjalan lancar, maka kekuatan dan kohesi nasional akan terwujud (Santoso, 2001).

Pernyataan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang pembangunan daerah perbatasan diungkapkan oleh gubernur Kalimantan Timur sebagai berikut.

Gubernur Kalimantan Timur menjelaskan bahwa pembangunan di daerah perbatasan Kalimantan Timur adalah: untuk membangun kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru yang berdaya tahan dan berdaya saing, berbasis pada sumber daya alam lestari dan sumber daya manusia yang handal. Sasaran yang ingin dicapai dalam konteks tersebut adalah terciptanya kawasan yang memiliki keunggulan daya saing melalui upaya pemanfaatan dan penguatan kapabilitas yang dimiliki, terwujudnya kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan yang eksis dalam intraksi pasar global, dan terwujudnya kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah dan nasional (Fauzan, 2006).

Pembangunan di wilayah perbatasan di Kalimantan Timur menekankan pada tiga aspek dasar yaitu membangun kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan keunggulan kompetitif dalam pasar global, serta penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Kebijakan pemerintah mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pertumbuhan yang eksis melalui pasar global memberikan kesan bahwa aspek kemajuan lebih diprioritaskan dan ditekankan daripada aspek kebersamaan.

Kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pada salah satu aspek ini bukan suatu kebijakan yang tepat karena: (1) kebijakan itu hanya memihak pada aspek kemajuan saja, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kohesi nasional. (2) kebijakan itu dirasakan tidak adil karena dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air satu, tanah air Indonesia itu saling berhubungan dengan cara yang dinamis yang dapat mengembangkan dan memperkuat identitas nasional yang bersifat positif dan reflektif. (3) kebijakan tersebut kurang menyentuh nasionalisme primer yang cakupannya adalah etnisitas, di mana Kalimantan berada pada urutan kedua secara nasional dengan jumlah etnik sebanyak 73 (Taneko, 1986).

Membangun nasionalisme di wilayah perbatasan perlu mengidentifikasi secara menyeluruh berbagai faktor yang diperlukan yaitu Sosial Capital, Economic Capital, Human Capital, Physical Capital, dan Natural Capital. Dalam hal ini capital harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting dalam suatu proses investasi, yang tanpa itu tidak mungkin investasi dapat berjalan dan dilaksanakan. Menurut J. Coleman (1990) bahwa dalam implementasinya kelima jenis Capital ini tidak harus dilakukan secara bersama-sama dan simultan dalam suatu proses investasi, melainkan dapat dilakukan secara parsial atau diutamakan pada salah satunya saja. Meskipun demikian, menyadari bahwa tidak ada capital yang benar-benar terpisah satu sama lain sangat penting selalu dimiliki. Karena itu

apabila salah satu capital saja dijadikan sebagai investasi, maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara sinergi dengan program-program penguatan *capital* lain sehingga memungkinkan kekuatan-kekuatan (modalitas) itu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka penciptaan kehidupan yang lebih baik.

MODAL SOSIAL SEBAGAI HASIL DAN PRODUKSI INTEGRASI SOSIAL

Konsep modal sosial (*social capital*) menggambarkan modalitas di masyarakat sosial yang menggambarkan kekuatan masyarakat untuk memperkuat integritas sosialnya. Istilah modal sosial pertama kali digunakan oleh Robert D. Putnam. Ia mengartikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi (Putnam, 1993). Definisi ini kemudian “disempurnakan” dengan menggambarkan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial – jaringan, norma, dan kepercayaan – yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Putnam dalam Field, 2010). Modal sosial memudahkan koordinasi, dan kerjasama untuk keuntungan dan tujuan bersama.

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Dia mendefinisikan modal sosial sebagai “*the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition*”. Modal sosial mengandalkan kekuatannya pada kondisi jaringan tentang hubungan perkenalan dan pengakuan yang terinstitusional. Pengertian yang lain tentang modal sosial berasal dari Bank Dunia (2002) yang mengemukakan bahwa modal sosial menunjuk pada norma, nilai, hubungan, institusi yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Kondisi modal sosial dapat merangsang tumbuhnya semangat untuk melakukan hubungan satu sama lain secara intensif. Kualitas dan kuantitas hubungan atau jaringan sosial yang terbangun akan sangat ditentukan oleh kualitas modal sosial.

Modal Sosial memiliki definisi yang bervariasi. Para pakar menawarkan definisi tentang modal sosial dalam beberapa nuansa sesuai dengan fokus dan lingkungan sosial tempat definisi itu diterapkan. Namun pada dasarnya modal sosial mempersoalkan jaringan sosial dan hubungan-hubungan yang berlangsung antara satu dengan yang lain yang biasanya didasarkan pada adanya pengakuan dan kesamaan nilai serta kerbermanfaatan yang sama dan timbal balik. Oleh karena itu, modal sosial dapat melahirkan kekuatan sosial yang menjadi sumber daya untuk menggerakkan kebersamaan menuju kehidupan dan kondisi yang lebih baik. Inilah yang menjadi gagasan sentral modal sosial, bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai karena mendorong individu untuk bekerjasama satu sama lain untuk memperoleh manfaat timbal balik (Field, 2003). Oleh karena itu penguatan terhadapnya akan menjadi “kebaikan” karena akan mendorong elemen dan

kekuatan sosial untuk bergerak menuju integritas, sebaliknya hancurnya modal sosial akan dapat melemahkan integritas sosial.

Granovetter (dalam Anang, 2008) mengatakan bahwa modal sosial sebagai ikatan antara anggota klik sosial (*Social Cliques*), di mana ikatan antara sesama anggota klik sosial cenderung kuat. Dan sebaliknya, ikatan di luar anggota klik sosial cenderung melemah. Definisi tersebut sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Marsh (dalam Soetandyo, 1991). Marsh membuat studi atas lima belas anggota kehidupan, yang masing-masing berbeda dalam hal kekuatan klik sosial. Lima belas kelompok itu digolongkan bertingkat-tingkat menurut derajat kekuatan masing-masing kelompok, sampai dimana jauhkah warga-warga kelompok menyadari adanya kelompok lain diluar kelompoknya sendiri dan juga kelompoknya itu disadari sebagai bagian saja dari kelompok lain yang lebih besar. Sementara itu kelima belas kelompok digolong-golongkan pula banyak atau tidaknya jumlah pelanggaran-pelanggaran norma yang terjadi di dalamnya. Dalam studi itu, Marsh menemukan bahwa semakin kuat klik sosial kelompok itu yang ditandai oleh semakin tidak adanya kesadaran pada warga kelompok yang bersangkutan bahwa di luar kelompoknya itu sesungguhnya masih banyak terdapat kelompok-kelompok lain dan bahwa kelompok itu hanyalah bagian saja dari kelompok lain yang lebih besar, maka semakin kecil atau sedikit jumlah pelanggaran norma yang terjadi di dalamnya. Implikasi dari gambaran tersebut, bahwa modal sosial memberikan kekuatan kepada warga masyarakat untuk bersikap terbuka dan bekerjasama dengan siapapun dalam berbagai kegiatan pembangunan yang ada di lokasi mereka guna peningkatan kesejahteraan sosialnya.

Modal sosial adalah hasil (produk) dari suatu relasi sosial yang positif dalam suatu jaringan sosial, namun modal sosial juga merupakan fungsi dan kekuatan untuk membangun jaringan sosial yang lebih kuat. Oleh karena itu kualitas modal sosial itu sangat ditentukan oleh kehendak individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk membangun jaringan, tetapi ia kekuatan modal sosial juga ditunjukkan oleh kekuatannya dalam mempengaruhi orang-orang yang ada dalam jaringan sosial itu untuk menaati ketentuan dan nilai-nilainya. Modalitas yang positif (kuat) akan dapat menciptakan fleksibilitas relasi dalam jaringan sosial itu, karena setiap individu telah “terkontrol” sendiri oleh kepentingannya untuk senantiasa memperkuat modal sosial. Itulah sebabnya mengapa modal sosial akan berdampak pada laju dan berhasilnya upaya-upaya menuju kehidupan yang lebih baik.

Modal sosial positif adalah syarat utama bagi keberhasilan pengembangan masyarakat. Semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas proses dan hasil pengembangan masyarakat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Modal sosial dapat menciptakan integrasi sosial; Integrasi sosial menciptakan ketenangan dan jaminan keberlangsungan semua upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Modal sosial yang sangat

berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian akan berdampak pada semakin kuatnya modal sosial itu.

Kepercayaan sebagai modal utama dalam membangun sifat-sifat atau nilai-nilai kohesi sosial, kebersamaan, toleransi, dan empati. Melalui kepercayaan yang kuat individu-individu tidak diposisikan sebagai objek yang diamati secara sosial. Mereka menjadi subjek yang bergerak bebas dalam kesadaran diri untuk menaati norma dan nilai modal sosial untuk membangun jaringan sosial dalam rangka mewujudkan harapannya. Dengan kata lain, dalam modalitas sosial positif, fungsi-fungsi kontrol dalam pengembangan masyarakat relatif longgar karena adanya saling percaya sesama individu.

Berdasarkan ketiga definisi modal sosial yang telah diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Modal Sosial mempunyai dua arah yang berbeda, yaitu dapat berkembang dan dapat juga berkurang. Hal ini tergantung bahwa berfungsinya institusi-institusi sosial yang ada dalam masyarakat.
2. Modal sosial memberikan kepastian kepada orang dalam masyarakat untuk bertindak.
3. Interaksi antara kepercayaan dan kerjasama yaitu: kepercayaan memudahkan kerjasama dan kerjasama itu sendiri memerlukan kepercayaan.
4. Interaksi antara kepastian dan kepercayaan yaitu: kepastian itu merupakan bagian dari kepercayaan dan kepercayaan itu dapat memastikan pengembangan norma-norma sosial yang selanjutnya dapat meningkatkan kesediaan untuk terlibat dalam pembangunan.
5. Kepastian bertindak bagi individu berawal dari pengetahuan, pengalaman, dan sikap.
6. Semua institusi itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan struktural yang saling mendukung.

Dengan demikian, semua nilai yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang dapat menjadi modal sosial untuk suatu program pembangunan. Dinamika kepentingan yang berkembang di masyarakat menjadi variabel yang dapat memperkuat atau melemahkan modal tersebut.

PENGUATAN MODAL SOSIAL MENUJU NASIONALISME

Nasionalisme merupakan suatu paham yang mencerminkan satu konsep identitas bersama bagi sekelompok manusia untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Nasionalisme mengekspresikan rasa cinta sekelompok orang (warga negara) yang menumbuhkan keinginan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negaranya. Pengertian nasionalisme yang dihubungkan dengan perasaan kebangsaan telah dijelaskan oleh pemikir-pemikir seperti *Joseph Ernest Renan* (1823-1892) dan *Otto Bouwer* (1882-1939). J. Ernest Renan yang menganut aliran nasionalisme yang didasarkan faktor kemanusiaan, mengemukakan bahwa munculnya suatu bangsa karena adanya kehendak

untuk bersatu (satu suara persatuan). Sedangkan Otto Bouwer mengungkapkan bahwa perasaan kebangsaan timbul karena persamaan perangai dan tingkah laku dalam memperjuangkan persatuan dan nasib bersama. Nasionalisme timbul karena faktor kemanusiaan, tetapi keduanya memberikan tekanan yang berbeda. Pertama, J. Ernest Renan menekankan faktor persamaan nasib, sedangkan Otto Bouwer menggariskan faktor persamaan nasib. Kedua, dengan perbedaan tekanan maka kesimpulan tentang nasionalisme juga berbeda. Menurut J. Ernest Renan, suatu bangsa timbul karena dorongan kemauan (contohnya bangsa Amerika Serikat); sedangkan Otto Bouwer, suatu bangsa timbul karena pengalaman penderitaan, kesengsaraan, dan kepahitan hidup yang sama, seperti nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika; timbul akibat persamaan nasib sebagai bangsa yang terjajah.

Nasionalisme tumbuh dan berkembang melalui tahapan-tahapan kesadaran akan pentingnya kebersamaan. *Hans Kohn* (1986) menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme memmanifestasikan kesadaran berbangsa dan bernegara atau semangat bernegara (*Mulyana*, 1986). Oleh karena itu nasionalisme dalam taraf pembentukannya sangat terkait dengan alasan-alasan subjektif seperti seperti *group consciousness, we-sentiment, corporate will*, atau kekuatan mental lain. Pada taraf ini nasionalisme belum memasukkan unsur-unsur objektif seperti territorial (wilayah), negara, bahasa, dan tradisi bersama.

Dalam arti modern, nasionalisme untuk pertama kalinya muncul di Eropa pada abad ke-18. Lahirnya paham nasionalisme ini diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional atau negara kebangsaan. Pada mulanya terbentuknya negara kebangsaan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor objektif seperti: persamaan keturunan, bahasa, adat-istiadat, tradisi, dan agama. Akan tetapi kebangsaan yang dibentuk atas dasar paham nasionalisme lebih menekankan kemauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan. Faktor keturunan dan asal-usul tidak penting dalam konsep ini. Mengingat karakter plural Indonesia, pemahaman nasionalisme sebagai kehendak bersama untuk hidup dalam negara kebangsaan lebih penting untuk ditekankan daripada pemahaman yang mengandalkan kesamaan keturunan atau asal-usul.

Perasaan dan kesadaran akan identitas bersama ini menjadi modal sosial yang penting dalam membangun modal sosial sebagai suatu bangsa. Semakin kuat modal sosial itu semakin kuat nasionalisme, selanjutnya nasionalisme yang kuat juga akan memperkuat modal sosial sebagai suatu bangsa. Sebaliknya, modalitas nasionalisme yang melemah akan dapat melemahkan bahkan hancurnya modalitas sosial itu. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, perkembangan dan kekuatan modal sosial tergantung pada nilai dan norma serta individu-individu pada masyarakat itu sendiri. Nilai positif lokal di masyarakat akan menjadi potensi modal sosial, jika tidak hanya berguna bagi individu-individu tertentu tetapi juga bagi seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu keistimewaan-keistimewaan lokal yang diberikan kepada orang-orang tertentu jika dipandang menjadi

gangguan dan mungkin menjadi alasan terhalangnya penguatan modal sosial, sudah selayaknya ditinjau kembali. Melalui penguatan nilai-nilai yang berhubungan dengan kepentingan seluruh warga masyarakat maka nilai-nilai itu akan menjadi modal sosial, yang pada gilirannya bermanfaat pula untuk membangun nasionalisme.

Modal sosial bersifat dinamis. Eksistensinya sangat tergantung pada individu-individu yang membangun jaringan sosial itu. Bourdieu mengatakan bahwa agar modal sosial dapat bertahan nilainya, maka individu harus mengupayakannya (Field, 2010). Dalam kehidupan sekarang ini, tentu tidak mudah dihindari perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Elemen-elemen ini pada satu sisi dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat modal sosial karena fungsinya yang dapat memperlancar hubungan dan komunikasi satu sama lain, namun dampak negatifnya yang cenderung dapat menimbulkan deviasi modal sosial juga merupakan fakta negatif yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Individualisme dan orientasi pragmatis yang mungkin timbul dalam situasi itu dapat menggerogoti kehendak untuk membangun relasi sosial. Pemaknaan baru atas nilai-nilai kehidupan, individualitas, dan kepentingan praktis dalam membangun relasi sosial pun dapat menjadi persoalan baru yang mengancam modal sosial (semangat kebersamaan) sebagai suatu bangsa.

Melemahnya modal sosial mungkin saja terjadi karena diintervensi oleh modal sosial negatif. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi penggerusan modal sosial positif yang ada; misalnya gangguan terhadap interaksi sosial, rasa saling percaya yang menurun, pelanggaran norma sosial meningkat, krisis kepemimpinan, dan akhirnya kerenggangan hubungan sosial. Meningkatnya semangat nilai-nilai konsumerisme, pragmatis, dan individualistik, misalnya, akan mudah menimbulkan konflik dan perilaku menyimpang. Primodialisme dan sentimen kedaerahan dan kesukuan juga dapat menimbulkan persoalan sosial. Hal ini akan semakin parah jika dibarengi oleh lemahnya fungsi kontrol sosial dan intensitas komunikasi yang rendah.

Fakta bahwa daerah-daerah perbatasan sering ditandai oleh ketertinggalannya dari daerah di pusat-pusat kota. Kesulitan akses mendapatkan pendidikan, kesehatan, atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menjadi alasan bagi ketidakpuasan dan kecemburuan terhadap daerah lain. “Ketergantungan” kepada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhannya akan menjadi virus mental dan modal sosial negatif karena tumbuhnya kekecewaan, sikap apatis, atau bahkan ketidakbanggaan sebagai suatu bangsa. Kemungkinan seperti inilah yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah dan kita semua. Lama kelamaan terjadi krisis kepercayaan terhadap institusi sosial lokal.

Oleh karena itu, penting untuk memperkecil terjadinya modal sosial negatif dalam rangka penguatan modal sosial. Beberapa pendekatan yang bisa dikembangkan antara lain:

1. Pendidikan agama sebagai sumber pengembangan nilai-nilai luhur untuk membangun sifat kebersamaan dan saling percaya sesama manusia. Termasuk untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan identitas sebagai bangsa. Namun

demikian pendekatannya tidak sebatas perkembangan kognitif namun seharusnya pada pengembangan sikap atau afektif.

2. Pendidikan keluarga. Sebagai sistem sosial terkecil keluarga dapat menjadi basis utama dalam menanamkan nilai moral kehidupan. Di sini peran kepala keluarga menjadi sangat sentral dalam member teladan perilaku yang baik.
3. Pemeliharaan dan pengembangan institusi sosial. Proses pembelajaran keahlian bekerjasama, norma hubungan timbal balik, dan tindakan kolektif perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Selain itu institusi diharapkan mampu mengembangkan solidaritas sosial dalam menghadapi situasi apapun.
4. Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang ada dalam modal sosial khususnya yang menyangkut pendidikan karakter perlu ditingkatkan mulai sejak dini baik melalui pendidikan formal maupun informal.
5. Pengembangan komunikasi informasi lewat beragam media dan saluran seni budaya diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai luhur dari kearifan lokal, kerjasama, saling percaya, dan tanggung jawab.
6. Nilai-nilai dari luar tidak harus dihambat masuk sejauh memiliki hal-hal yang dianggap positif dan bahkan memperkuat modal sosial yang sudah ada. Asalkan dilakukan penyaringan secara selektif oleh institusi sosial dan khalayak luas.

Sikap-sikap kooperatif menunjukkan adanya keterbukaan untuk menerima pihak yang berbeda sebagai bagian dari dirinya (sistem sosialnya). Nilai-nilai budaya masyarakat merupakan kepercayaan yang mendorong tumbuhnya perilaku kooperatif memudahkan pengembangan bentuk-bentuk asosiasi baru (Fukuyama, 1995). Kualitas perilaku yang kooperatif ini ditanamkan dalam hubungan perkenalan, pertemanan, serta persahabatan yang saling menguntungkan dan membentuk satu kesatuan struktural. Melalui empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama kolektif dapat dibangun hubungan antar individu yang memperkuat jaringan sosial. Kekuatan hubungan yang bersifat simbiose mutualisme ini dapat memperlancar pengembangan wilayah perbatasan dalam kerangka NKRI.

Modal sosial dapat dikembangkan melalui pendekatan sikap yaitu kepercayaan dan norma timbal balik yang diterima secara umum (Coleman, 1990). Tertib bermasyarakat dapat dikendalikan karena adanya norma-norma sosial. Dengan kata lain, norma-norma diperlukan untuk menjadi pedoman bagi warga masyarakat dalam bertindak. Penguatan pranata sosial lokal penting untuk dilakukan, namun tentu saja hal tersebut tidak bertentangan dengan kehendak kebersamaan sebagai suatu bangsa. Artinya penguatan pranata lokal itu seharusnya dikembangkan dalam batas-batas yang dapat mengendalikan primordialisme dan etnisitas yang sempit. Selain itu, saling hubungan antara satu pranata dengan yang lain juga menjadi “jaminan” bahwa pranata-pranata yang ada berjalan selaras menuju satu tujuan yang sama.

Dalam konteks ini institusi pendidikan tidak boleh bertentangan dengan institusi penelitian, agama, hukum, perkawinan, adat, politik, pemerintahan, militer, kesehatan, dan

ekonomi. Institusi-institusi sosial dikuatkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yang pada dasarnya mempunyai fungsi:

1. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
2. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam bertindak agar tidak bertentangan dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat.
3. Mengembangkan cara/organisasi/perilaku untuk memenuhi kebutuhan pokok.
4. Memberi pegangan kepada masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah terutama yang menyangkut kebutuhan.
5. Menjaga keutuhan masyarakat.
6. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial (Soekanto, 2000).

Apabila fungsi berbagai institusi sosial ini dapat dijalankan secara benar, maka warga masyarakat mempunyai kesadaran akan kebersamaan dan kemajuan yang dapat menciptakan kohesi sosial baik secara lokal maupun nasional. Institusi-institusi sosial seperti ini merupakan modal sosial yang dapat memberikan jaminan bagi pentingnya membangun dan menjaga modal sosial nasional.

Mebiarkan daerah tetap tertinggal dari daerah yang lain dapat menjadi alasan tergerusnya modal sosial secara nasional. Perasaan terpinggir dapat menjadi pemicu munculnya identitas lokal yang berlebihan sehingga menimbulkan sikap penolakan terhadap suku bangsa yang lain. Identitas nasional menjadi menarik ketika muncul fenomena semakin menguatnya identitas-identitas kelokalan yang mewarnai kehidupan masyarakat. Identitas kelokalan merupakan identitas-identitas yang membentuk dirinya dalam identitas yang sifatnya partial dan lebih kepada kesamaan-kesamaan yang dibangun bersama pada entitas yang sama berdasarkan homogenitas (kesamaan) aktor-aktor yang disatukan di dalamnya. Identitas sosial kolektif kedaerahan ini menjadi semakin kuat dan tidak terkendali jika modalitas sosial tidak cukup kuat mengendalikannya. Primordialisme, etnosentrisme, dan penolakan terhadap pluralitas dapat menjadikan ikatan sebagai suatu bangsa terancam. Pada posisi seperti ini nasionalisme terasa sebagai modal sosial yang sangat penting bagi bangsa melebihi modalitas sosial kedaerahan.

Ketertinggalan, kekecewaan, keapatisan, dan ketidakpercayaan yang berkembang di daerah perbatasan dapat memicu tergerusnya modal sosial. Sulitnya mereka untuk mendapatkan akses memenuhi kebutuhan, bahkan kebutuhan pokok, menjadi persoalan tersendiri yang mungkin menggerus “kepuasan” dan “kebanggaan” menjadi bagian dari suatu bangsa yang maju. Sikap negatif yang timbul karena kondisi sulit ini dapat menjadi ancaman bagi kebersamaan sebagai suatu bangsa. Dalam kondisi seperti ini nasionalisme sebagai satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia mungkin tak lagi penting, karena mereka merasa “hidup sendiri” dan dianaktirikan.

Wilayah perbatasan seharusnya dijadikan sebagai benteng pelindung yang kuat agar tidak mudah “diintervensi” oleh kekuatan asing, yang tanpa disadari menggigit

masyarakat wilayah perbatasan untuk lebih melirik negara tetangga karena kemudahan dan akses yang diberikan. Intervensi sosial tidak selalu terjadi terang-terangan. Hal yang harus disadari adalah bahwa intervensi mental yang justru tumbuh karena "kesadaran diri" individu akan kondisi terpinggirnnya mereka dari negaranya sendiri akan dapat melahirkan kekuatan sosial yang menjadikan mereka tidak sensitif pada persoalan-persoalan nasionalisme. Hal ini tentu menuntut kepedulian pemerintah untuk menjadikan mereka tidak merasa terpinggir melalui penguatan-penguatan dan pembangunan modal ekonomi, budaya, dan sosial.

Pembangunan yang telah dilaksanakan telah menghasilkan banyak perubahan di dalam masyarakat. Pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan yang diharapkan dapat menjadi penguat kebersamaan sebagai sebuah bangsa, di lain pihak hal tersebut mungkin justru menjadi pemicu ketidakpuasan, bahkan sikap separatis ketika ternyata pembangunan hanya mengistimewakan daerah tertentu. Hal tersebut menyebabkan pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sehingga semakin memperlebar kesenjangan antarkelompok, antarwilayah, antardaerah, dan antaretnis. Daerah tertinggal karena jauh dari jangkauan seperti "kurang penting" untuk dibangun. Ini seperti kondisi di kota-kota besar; pusat kota indah dan bersih tetapi di pinggiran kota yang tersembunyi ternyata kotor dan kumuh. Jadi pembangun juga menjadi variabel penguat modal sosial, tetapi bersamaan itu dapat juga menjadi pelemah modal sosial.

Reformasi atau otonomi daerah, dan ketidakmerataan pembagian kue pembangunan dapat berdampak pada semakin menguatnya identitas kedaerahan, yang dipicu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan sosial. Resistensi terhadap ketidakadilan ini merupakan bentuk protes sosial yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi sentimen sosial. Banyak contoh yang bisa diungkap. Misalnya kasus-kasus pemisahan propinsi-propinsi, kabupaten-kabupaten, atau bahkan desa-desa, tidak selalu dilandasi oleh keinginan untuk pemerataan kesejahteraan, namun kadang-kadang didukung alasan ketidakpuasan atau minoritas-mayoritas kelompok, baik itu agama atau etnis. Etnisitas yang menguat seiring dengan melemahnya keinginan untuk mempertahankan kebersamaan seperti ini dapat menjadi awal terkikisnya modal sosial suatu bangsa.

Semangat memisahkan diri akan sangat mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan derasnya arus informasi sebagai hasil kemajuan teknologi yang telah diraih. Arus informasi dominan cenderung sangat globalistik sehingga dapat meminimalisir peran negara (*nation state*) – *stateless*. Di lain pihak, derasnya informasi global menghasilkan situasi paradoksal dalam bentuk menguatnya ikatan-ikatan tradisional dan ikatan lokal sebagai wujud resistensi jati diri. Kondisi tersebut memposisikan ikatan kebangsaan dalam wujud *nation state* semakin terhimpit dalam ikatan lokal dan ikatan global yang ekstrim. Nasionalisme dimaknai menjadi nasionalisme sempit kelompok etnisnya.

Pendekatan budaya dalam upaya mengukuhkan nasionalisme merupakan pilihan yang paling tepat. Tentu saja pendekatan fisik untuk memajukan ekonomi merupakan

pilihan yang tidak mungkin ditinggalkan. Pendekatan budaya yang dimaksud adalah memaksimalkan kohesivitas kolektif lokal secara tepat sehingga dapat menjadi modal sosial untuk menjadi pengikat rasa kebersamaan sebagai bangsa dan sekaligus memperkuat ketahanan budaya nasional, dalam memperkuat nasionalisme. Melalui tindakan yang memperkokoh ciri-ciri diri sebagai bangsa, baik dalam konteks nasional maupun lokal, nasionalisme dapat dikuatkan.

Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada peringatan sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari-hari besar nasional lain. Perasaan terikat sebagai suatu bangsa dengan harapan yang sama penting untuk senantiasa ditumbuhkan, palagi di wilayah-wilayah yang strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tidak ada kata yang lain yang harus dilakukan kecuali melakukan percepatan pembangunan. Ketertinggalannya dari daerah lain harus segera dikejar. Semua aspek kehidupan perlu mendapat sentuhan penguatan mengimbangi semakin menguatnya “nasionalisme lokal,” sehingga modal negatif ini tidak tumbuh menjadi benih-benih disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penguatan modal budaya melalui penggunaan produk-produk lokal dan penguatan produsen lokal demi kemajuan ekonomi daerah setempat penting untuk dilakukan. Pembangunan fisik dan ekonomi memang menjadi bagian yang penting untuk dilakukan, tetapi hal itu tidak berarti bahwa pembangunan modal yang lain menjadi tidak penting. Pembangunan tidak akan diterima dengan baik jika dilaksanakan dalam irama yang tidak selaras dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, pembangunan juga tidak akan bermanfaat maksimal ketika modalitas manusianya tidak siap menerima “modernisasi” itu. Di sinilah letak pentingnya melakukan pembangunan manusia untuk penguatan modal sosial.

Kesejahteraan yang tidak mencerminkan ketidakadilan sering dapat menjadi alasan lemahnya ikatan sosial di masyarakat. Kesenjangan ini bahkan sering menjadi semakin jauh karena kebijakan pendidikan yang cenderung bersifat diskriminatif pada orang-orang termarginal. Betapa tidak? Mari kita cermati, berapa banyak anak-anak dari daerah tertinggal yang tidak berkesempatan mendapatkan kesempatan belajar di sekolah yang baik dan berapa banyak pula yang dapat mengambil kesempatan itu. Karena institusi pendidikan tidak tersedia di wilayah-wilayah perbatasan maka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terutama dimiliki oleh mereka yang memiliki kemauan keras saja dan yang memiliki modal ekonomi kuat, karena biayanya menjadi lebih besar daripada ketika ia dapat sekolah “di rumah” sendiri. Jika pun ada institusi pendidikan, sering para pengajarnya merangkap banyak jabatan guru karena kurangnya jumlah tenaga pengajar. Jika dicermati lagi, ternyata guru-guru di sana tidak selalu memiliki kualifikasi seperti yang diharapkan. Bordieu mengemukakan bahwa mereka yang modal finansial dan budayanya tinggi cenderung memiliki modal sosial yang tinggi (Field, 2010). Tentu saja fenomena seperti ini akan memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan modal sosial. Kaum terpinggir akan semakin tertinggal oleh mereka yang tak terpinggirkan, yaitu para pemilik

modal ekonomi dan sosial. Konsekuensinya, mungkin mereka tidak berkembang secara optimal bahkan mungkin tertinggal dari teman-temannya.

Proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme, harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan sekolah. Untuk anak-anak kecil, salah satu cara yang paling efektif adalah melalui lagu. Lagu-lagu daerah yang menyerukan pesan kecintaan kepada tanah air, sesama, dan lingkungan adalah sumber ajaran moral yang dapat menumbuhkan modalitas sosial. Lagu-lagu perjuangan dan nasional yang membawa pesan keindonesiaan juga merupakan daya ikat kita sebagai suatu bangsa. Sungguh menyedihkan saat ini, pengajaran lagu-lagu perjuangan di sekolah sepertinya kurang diperhatikan. Dan sebagai akibatnya, anak-anak jaman sekarang justru cenderung hafal lagu-lagu orang dewasa, bahkan sering disertai dengan goyangan dan gaya orang dewasa pula.

Sentuhan serius untuk memajukan dan memperkuat posisi wilayah perbatasan tidak bisa diabaikan. Kebijakan SM3T yaitu sarjana mengajar di daerah terluar, terdepan, dan terpinggir merupakan salah satu terobosan untuk memajukan pendidikan salah satunya bisa saja di wilayah perbatasan. Sayang sekali kebijakan tersebut terkesan kurang serius, bahkan dapat dikatakan lebih berfungsi sebagai pintu masuk dan batu loncatan para sarjana itu untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan profesi guru setahun setelah mereka bertugas mengajar di wilayah itu. Mengapa tidak dibuat kebijakan yang mengharuskan mereka berada kembali di wilayah itu untuk menjadi guru dalam jangka waktu tertentu yang cukup lama misalnya setelah mereka mendapatkan sertifikat guru itu. Mereka mendapatkan kesempatan menjadi guru tersertifikasi dan mendapat tunjangan profesi “secara instan,” tetapi bersamaan dengan itu upaya untuk memajukan pendidikan di wilayah-wilayah marginal pun terjawab.

Orientasi pembangunan untuk memajukan wilayah-wilayah perbatasan harus diorientasikan pada kebutuhan bersama untuk membuat wilayah-wilayah ini lebih baik. Koordinasi dan kerjasama pembangunan yang dilakukan antar pemerintah yaitu antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah; antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antar Negara, antara pemerintah pusat dan daerah dengan wilayah perbatasan itu sendiri. Keterlibatan berbagai komponen seperti pemerintah dan berbagai dinas, badan mulai level pemerintah kabupaten, propinsi hingga pemerintah pusat bahkan negara tetangga bertujuan untuk keuntungan bersama yang diorientasikan kepada kemajuan dan penguatan wilayah perbatasan, seperti:

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan di wilayah kawasan perbatasan.
2. Pengembangan potensi dan memecahkan permasalahan bersama di kawasan tersebut melalui penguatan potensi lokal.
3. Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Bagaimana pun lajunya pembangunan di suatu daerah, hal tersebut akan sia-sia jika keberadaannya tidak dibarengi dan didukung oleh peningkatan kualitas individu-individu di wilayah itu. Mereka harus dibangun tetapi bersamaan dengan itu mereka pun harus

diposisikan secara terintegrasi dalam pembangunan itu. Mereka tidak tercerabut bahkan menjadi korban bagi pembangunan, tetapi mereka terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan serta bisa hidup dan menikmati hasil-hasil pembangunan itu. Pembangunan harus menyejahterakan mereka dan menjadikan mereka “penting” dalam proses itu. Kesadaran bahwa mereka penting dalam proses pembangunan hanya akan terjadi jika mereka tidak dipisahkan dari pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan harus bersama-sama diorientasikan untuk memajukan wilayah perbatasan dan mengangkat kesejahteraannya, yang pada gilirannya dapat membangun nasionalisme. Potensi modal positif lokal seperti nilai-nilai dan ajaran lokal tentang tanggung jawab, toleransi, keterbukaan, penghargaan sesama harus dikembangkan sebagai modal sosial yang tidak hanya menyemaikan primordialisme dan etnosentrisme yang justru berdampak negatif bagi pengembangan modal sosial nasional (nasionalisme). Penguatan modalitas sosial kedaerahan ini harus dikembangkan dalam konteks kecintaan dan kebutuhan untuk menjaga keutuhan NKRI.

KESIMPULAN

Modal sosial kedaerahan menjadi bagian penting dalam membangun modal sosial nasional. Tentu saja, pembangunan fisik semata yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi akan dapat menjadi hambatan tumbuhnya integrasi dan jaringan sosial yang penting dalam membangun modal sosial. Untuk itu menguatkan potensi modal sosial positif yang membawa wilayah perbatasan dalam kehidupan yang lebih baik tidak bisa ditinggalkan.

Pemosisian wilayah-wilayah perbatasan sebagai gerbang dan pagar nasionalisme dan integritas nasional ini melahirkan kebutuhan bersama untuk memajukan dan menguatkan wilayah-wilayah ini beserta semua potensi di dalamnya. Nilai-nilai sumberdaya potensial yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dapat mengembangkan modal sosial. Pembangunan di wilayah perbatasan harus berbasis penguatan modalitas wilayah tersebut. Pembangunan yang meminggirkannya dan menempatkannya sebagai korban pembangunan akan dapat menciptakan kecemburuan sosial yang justru dapat menggerogoti kapasitas modal sosial itu. Struktur sosial budaya pada tingkat mikro, mizo, dan makro yang potensial, dapat dijadikan modal sosial dalam membangun nasionalisme di wilayah perbatasan. Membangun nasionalisme di wilayah perbatasan merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan kabupaten/kota maupun provinsi dalam penguatan modal sosial setempat merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan sesuai dengan pembangunan yang terintegratif. Membangun wilayah perbatasan tanpa mengabaikan nilai-nilai dan budaya kedaerahannya akan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan yang menguatkan tidak hanya modal sosial lokal tetapi juga modal sosial nasional. Memperkokoh modalitas (ekonomi, sosial, dan budaya) di wilayah perbatasan akan

menghasilkan kuatnya modalitas sosial nasional yang menyemaikan dan menumbuhkan nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, J.S. 1990. *Foundations of Social Company*. Cambridge: Harvard University Press.
- Faozan, Haris, 2006. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Sebagai Agenda Utama Optimasi Pengelolaan Daerah Perbatasan. *Jurnal Administrator Borneo*, PKP2A III LAN, Samarinda, 2006: Volume 2 No. 2.
- Fukuyama, F., 1995. *Trust: The Social Virtuss and The Creation of Prosperity*. London: Hamish Hamilton.
- Field, John, 2010. *Modal Sosial*. Diterjemahkan: NURHADI. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kistyanto, Anang, 2006. Modal Sosial dan Kesuksesan Karier: Prospek Penelitian Manajemen SDM. *Jurnal Eksekutif, IBMT*. Surabaya, 2006, Volume 3, Nomor 3.
- Kistyanto, Anang, 2008. Modal Sosial dan Sponsor Karier: Pengaruhnya terhadap Kesuksesan Karier Manajer. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Fakultas Ekonomi Unibraw, Malang, 2008, Volume 6, Nomor 2.
- Lawang, Robert, M.Z, 2003. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Pendekatan Sosiologik Dengan Kontribusi Teori Social Capital sebagai Usaha Awal. *Jurnal Sikat*, Depsos RI, Jakarta.
- Mangkuprawira, Safri, 2009. *Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat*. Makalah Seminar Nasional Forkapi, Bogor 19 November 2009.
- Marsetio, 2005. *Pendayagunaan Wilayah Perbatasan Laut Guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa*, <http://www.tnial.milid/cokrad>.
- Rauf, M., 2008. *Mengubah Karakter Bangsa Warisan Orde Baru Dalam Refleksi Karakter Bangsa*. Jakarta: Forum Kajian Antropologi Indonesia.
- Santoso, P., 2001. Merajut Koleksi Nasional: Etno – Nasionalisme dan Otonomi Daerah dalam Proses Demokratisasi. *Ilmu Sosial dan Ilmu Praktik*. Vol 4, No. 3.
- Soebroto, Soetandyo Wignjo, 1991. *Tertib Masyarakat Manusia*. Surabaya: FISIP, Unair.

Soekanto, Soekanto, 2000. *Sosiologi*. Jakarta: Radjawali Pers.

The World Bank, 2002. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington D.C.